Psikotes: Jurnal Ilmu Psikologi, Komunikasi, dan Kesehatan
Vol. 4 No.1 Oktober - Maret
E-ISSN: 3047-5937

Kepentingan Berlapis Dalam Komunikasi Konflik Infrastruktur Energi Terbarukan; Studi Kasus PLTS Terapung Danau Singkarak

Rahman Karim, Emeraldy Chatra, Sarmiati
Universitas Andalas, Indonesia
Corresponding E-mail: rahmankarim796@gmail.com

ABSTRACT

This study examines how layered interests among state, corporate, local government, political, customary, and community actors shape communication conflict surrounding the Floating Solar Power Plant (PLTS) project in Lake Singkarak, West Sumatra, Indonesia. Employing a qualitative approach informed by Derrida's deconstruction and Goffman's dramaturgy, the study analyzes government Public Relations practices and how local communities negotiate the meanings they produce. Data were collected through in-depth interviews with 13 informants, non-participant observation, and documentation of policy texts, media coverage, and community statements. The findings show that community resistance is not a homogeneous rejection of development or renewable energy. It is shaped by historical experience with the Singkarak hydropower project (operating since 1992), the authority structure of niniak mamak, and unresolved ecological concerns. Government communication resembles a one-way asymmetrical model, in which the front-stage narrative of participation contradicts back-stage realities such as procedural socialization, information filtering, and institutional ambiguity. The study introduces the concept of layered interests to explain how state, corporate, and local actors simultaneously claim to represent "the people's voice" while pursuing distinct agendas, thereby extending Critical Public Relations theory beyond a simple state versus society opposition.

Keywords: *Infrastructure Conflict, Critical Public Relations, Layared Interests*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC- BY International license. E-ISSN: 3032-2421, DOI: 10.59548/ps.v4i1.807

Pendahuluan

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak dipromosikan pemerintah sebagai bentuk kemajuan transisi energi dan keberlanjutan. Namun, penolakan masyarakat lokal di Tanah Datar, Kecamatan Batipuh selatan menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekadar persoalan teknis dan infrastruktur, tetapi mengenai pola komunikasi berlapis yang mengandung banyak makna dan kepentingan hingga menimbulkan pertarungan makna, kepentingan, dan identitas lokal. Hal ini tampak pada Singkarak proyek diklaim partisipatif, tetapi warga mengeluhkan minimnya konsultasi dan ancaman terhadap ekosistem Bilih, ruang ekonomi, spiritualitas danau, serta kedaulatan adat.

Di balik narasi resistensi kolektif, terdapat fragmentasi kepentingan, kontestasi kekuasaan, dan mobilisasi politik yang menjadikan konflik pembangunan sebagai arena bagi berbagai aktor untuk memperkuat posisi dan pengaruh (Hadi et al, 2019). Rencana pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak merupakan bagian dari agenda Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang transisi energi. Proyek ini melibatkan PT Indonesia Power sebagai pelaksana dan berkolaborasi dengan investor swasta, PT ACWA Power. Namun, sejak awal sosialisasi pada 2020, proyek ini memicu resistensi masyarakat yang meluas. Menariknya, resistensi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari pengalaman historis pembangunan PLTA Singkarak pada 1992, kekhawatiran ekologis terhadap kelestarian ikan bilih, serta ketidakpercayaan terhadap praktik komunikasi dan pengambilan keputusan pemerintah (Umam et al., 2024).

Hidayat, Tambunan, & Haning (2025) secara langsung membahas ekonomi politik pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mereka menemukan bahwa proyek infrastruktur di pemerintah daerah dapat memiliki fungsi ganda sebagai instrumen pembangunan ekonomi sekaligus komoditas politik, dengan adanya praktik *rent-seeking* dan kolusi elite dalam proses kebijakan dan pengadaan infrastruktur. Infrastruktur pembangunan di tingkat lokal memiliki fungsi ganda sebagai alat pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai komoditas politik. Pola hubungan antara pengusaha dengan politisi lokal dan elite eksekutif dalam penganggaran infrastruktur sering kali menunjukkan monopoli tender proyek oleh politisi dengan pengusaha di parlemen lokal (Ar-ridho & Ishartono, 2019).

Komunikasi pembangunan dengan demikian menjadi arena tempat berbagai aktor berusaha menentukan makna yang dianggap sah. (Melkote & Steeves, 2015) menekankan bahwa komunikasi pembangunan perlu memperhatikan partisipasi, pemberdayaan, dan keadilan sosial, sehingga masyarakat tidak ditempatkan semata sebagai penerima pesan pembangunan.

Dalam praktik Public Relations, proses tersebut berkaitan dengan bagaimana organisasi menampilkan dirinya kepada publik dan mengelola persepsi mengenai kebijakan yang dijalankannya. Goffman (1959) melalui perspektif dramaturgi menjelaskan bahwa interaksi sosial dapat dipahami sebagai pertunjukan yang melibatkan pengelolaan penampilan di hadapan audiens. Konsep Impression Management kemudian membantu menjelaskan bagaimana aktor mengatur informasi, simbol, pesan, dan perilaku untuk menghasilkan kesan tertentu. Dalam konteks pembangunan, strategi tersebut dapat terlihat melalui penggunaan narasi energi hijau, transisi energi, keberlanjutan, kepentingan nasional, serta berbagai forum sosialisasi yang dirancang untuk membangun penerimaan publik.

Namun, Public Relations tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Perspektif Critical Public Relations melihat praktik komunikasi organisasi sebagai bagian dari produksi makna, legitimasi, dan relasi kuasa. Dalam konteks konflik pembangunan, pertanyaan penting bukan hanya bagaimana pemerintah menyampaikan pesan, tetapi juga siapa yang mempunyai kemampuan menentukan narasi pembangunan, suara siapa yang dianggap sah, serta pengalaman siapa yang tidak memperoleh ruang dalam komunikasi resmi (sedu et al, 2026).

Persoalan tersebut semakin kompleks dalam konteks masyarakat Minangkabau. Struktur sosial masyarakat tidak hanya dibangun melalui institusi administratif formal, tetapi juga melalui struktur adat yang menempatkan niniak mamak sebagai salah satu pemegang otoritas sosial dalam kaum dan nagari (Putra & Supanggah, 2018). Dalam konteks demikian, komunikasi kolektif melalui forum sosialisasi tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi. Pertemuan formal yang mengumpulkan banyak pihak dapat memenuhi kebutuhan administratif komunikasi, tetapi belum tentu memenuhi mekanisme legitimasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Komunikasi interpersonal dengan pemangku otoritas adat menjadi penting karena penghormatan terhadap kedudukan, marwah, dan tanggung jawab

niniak mamak menentukan bagaimana suatu pesan diterima dan dinegosiasikan.

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara definisi partisipasi menurut institusi pembangunan dan pemaknaan partisipasi menurut masyarakat lokal. Bagi institusi, partisipasi dapat direpresentasikan melalui kehadiran dalam sosialisasi atau forum konsultasi. (Mariana, 2017) Bagi masyarakat, partisipasi dapat menuntut pengakuan terhadap pengalaman historis, struktur adat, dan posisi sosial pihak yang diajak berkomunikasi. Perbedaan tersebut menghasilkan celah komunikasi yang kemudian berkembang menjadi persoalan legitimasi.

Penelitian mengenai konflik pembangunan energi menunjukkan bahwa resistensi masyarakat tidak selalu dapat dijelaskan sebagai penolakan terhadap modernisasi. Konflik energi sering melibatkan pertarungan narasi, distribusi manfaat, kekhawatiran ekologis, dan hubungan kekuasaan (Firdaus & Efendi, 2025).

Di sinilah penelitian ini menempatkan dekonstruksi Jacques Derrida sebagai pendekatan kritis. Dekonstruksi tidak digunakan untuk mencari makna tunggal yang benar, tetapi untuk memperlihatkan ketidakstabilan makna, kontradiksi, oposisi biner, serta hubungan antara apa yang ditampilkan dan apa yang disembunyikan dalam suatu wacana. Wacana pembangunan dapat menampilkan oposisi antara pembangunan dan penolakan, modernitas dan tradisi, kepentingan nasional dan kepentingan lokal, serta kepentingan umum dan kepentingan kelompok. Oposisi tersebut tidak bersifat netral karena dapat menghasilkan hierarki yang menempatkan satu posisi sebagai lebih rasional atau lebih legitimate dibandingkan posisi lainnya.

Penelitian ini karena itu tidak memandang masyarakat sebagai kelompok yang sekadar menerima atau menolak pembangunan. Resistensi dibaca sebagai praktik komunikasi yang mengandung pengetahuan, pengalaman, dan artikulasi kepentingan. Pada saat yang sama, pemerintah tidak diposisikan semata-mata sebagai aktor yang sepenuhnya homogen. Praktik komunikasi pembangunan berlangsung dalam struktur kelembagaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, perusahaan mitra, tokoh adat, masyarakat, dan aktor politik. Masing-masing mempunyai posisi, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda dalam menentukan makna pembangunan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dibatasi pada praktik Public Relations pemerintah dalam komunikasi pembangunan PLTS Terapung di

Danau Singkarak serta respons dan pemaknaan masyarakat lokal terhadap praktik komunikasi tersebut. Penelitian tidak diarahkan untuk menilai kelayakan teknis PLTS, melainkan menganalisis bagaimana komunikasi membentuk representasi pembangunan, legitimasi, dan resistensi dengan pertanyaan penelitian: bagaimana kepentingan berlapis dari berbagai aktor terbentuk dan dinegosiasikan melalui praktik komunikasi konflik PLTS Terapung Danau Singkarak?

Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya mengenai konflik infrastruktur di kawasan Danau Singkarak juga menunjukkan adanya keterlibatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial dalam konflik pembangunan hasil tulisan dari Dadan dan Efendi (2025) dengan judul Analitis Hambatan Komunikasi Rencana Pembangunan PLTS Singkarak dalam Mendukung Transisi Energi. Namun, kajian yang secara khusus membongkar bagaimana praktik Public Relations pemerintah membangun representasi pembangunan dan bagaimana representasi tersebut dinegosiasikan oleh masyarakat lokal masih terbatas.

Ali Ar-Ridho dan Ishartono melalui penelitian berjudul Konflik Kepentingan Lahan Warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan bahwa konflik pembangunan berkaitan dengan komunikasi pemerintah yang cenderung sepihak serta adanya ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan kepentingan warga kurang terakomodasi dalam proses kebijakan pembangunan rumah deret. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa konflik pembangunan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tetapi juga oleh bagaimana komunikasi berlangsung dan bagaimana posisi masing-masing pihak dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaannya, penelitian Ar-Ridho dan Ishartono berfokus pada konflik lahan dan kebijakan perumahan dengan pendekatan konflik struktural, sedangkan penelitian ini mengkaji komunikasi konflik dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan melalui studi kasus PLTS Terapung Danau Singkarak.

Giovana Sanchez Nieminen dan Essi Laitinen (2025) melalui penelitian berjudul Understanding Local Opposition to Renewable Energy Projects in the Nordic Countries menunjukkan bahwa penolakan masyarakat terhadap proyek energi terbarukan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dampak lingkungan, perubahan lanskap, rendahnya kepercayaan terhadap proses regulasi, kompensasi yang dianggap tidak memadai, serta ancaman terhadap

identitas budaya lokal. Kajian tersebut menegaskan bahwa konflik energi bersifat multidimensional dan tidak dapat disederhanakan sebagai fenomena My Back Yard (NIMBY). Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa masyarakat dapat membawa kepentingan yang beragam ketika berhadapan dengan proyek energi terbarukan. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan tinjauan literatur sistematis dengan cakupan negara-negara Nordik, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu kasus lokal, yaitu PLTS Terapung Danau Singkarak, dengan perhatian khusus pada komunikasi sebagai ruang munculnya kepentingan yang berlapis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekonstruktif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti membongkar asumsi-asumsi dominan yang bekerja dalam praktik komunikasi pembangunan, serta mengungkap kontradiksi dan makna yang terpinggirkan dalam wacana resmi. Sebagaimana dikemukakan oleh (Derrida, 1997) dekonstruksi tidak dimaknai sebagai teknik analisis bahasa secara mikro, melainkan sebagai pendekatan kritis untuk mempertanyakan oposisi-oposisi biner yang selama ini dianggap alamiah dan netral dalam wacana sosial.

Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling dengan total 13 informan yang mencakup: masyarakat lokal terdampak (2 orang), tokoh adat (2 orang), pemerintah daerah (3 orang), pemerintah pusat (1 orang), aktor politik (1 orang), PT PLN (2 orang), dan tim sosialisasi PT Indonesia Power (2 orang). Pemilihan informan berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam konflik, pemahaman mendalam tentang permasalahan, dan representasi multiperspektif.

Data primer merupakan sumber data yang secara langsung diberikan kepada peneliti (Hardani, 2020) diperoleh melalui (1) wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 13 informan sebagaimana dirinci di atas, dilakukan dengan pendekatan personal peneliti berbaur bersama masyarakat melalui warung-warung dan mencari tokoh yang memahami permasalahan dari sudut pandang masyarakat dalam bahasa Minangkabau dan Indonesia, kemudian ditranskripsikan; (2) observasi non-partisipan terhadap dinamika sosialisasi dan resistensi di lapangan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat penuh tanpa ikut serta dalam kegiatan; dan (3) observasi pemberitaan media selama berlangsungnya konflik.

Data sekunder terdiri atas artikel ilmiah, dokumen kebijakan termasuk dokumen AMDAL yang disosialisasikan pada 2 Oktober 2025 pemberitaan media terkait konflik, rilis pers, surat pernyataan sikap masyarakat, serta laporan internal praktik komunikasi PR yang dihimpun dari pihak pelaksana proyek. Analisis data dilakukan secara tematik kritis dengan pendekatan dekonstruktif, mengikuti model Miles dan Huberman yang tidak memisahkan secara kaku antara proses pengumpulan dan pengolahan data. Proses analisis dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi relevan, dilanjutkan penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang disusun mengikuti lapisan-lapisan kepentingan (negara, korporasi, pemerintah daerah, aktor politik, tokoh adat, dan masyarakat), dan diakhiri penarikan kesimpulan yang bersifat dialogis dan siklikal, bukan final. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member check kepada informan kunci, audit trail, dan refleksivitas kritis peneliti.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai wilayah yang paling terdampak langsung oleh rencana pembangunan PLTS terapung, dengan pertimbangan intensitas konflik dan penolakan masyarakat yang tercermin dalam pemberitaan media, pernyataan sikap warga, serta dinamika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa konflik PLTS Singkarak bukanlah pertarungan hitam atau putih antara rakyat yang tertindas dan negara yang menindas. Di lapangan, beroperasi sesuatu yang jauh lebih rumit sebuah ekologi konflik di mana hampir setiap aktor membawa kepentingannya sendiri, menggunakan bahasa yang mengklaim mewakili kepentingan yang lebih luas, dan dalam prosesnya justru memperpanjang siklus konflik yang tidak kunjung selesai. Konflik ini menjadi arena bagi berbagai kepentingan ekonomi, politik, kultural, dan personal yang saling bertemu dan berbenturan (Radtke & Löw-Beer, 2025).

A. Sejarah yang Belum Selesai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembangunan PLTS Terapung tidak bermula ketika proyek diperkenalkan pada masyarakat, tetapi memasuki ruang sosial yang telah memiliki sejarah panjang hubungan antara pembangunan energi dan masyarakat. Danau Singkarak menjadi ruang tempat

kepentingan energi nasional, ekonomi lokal, hak ulayat, investasi, pemerintah, dan masyarakat bertemu. Dengan demikian, proyek baru mengaktifkan kembali sejumlah persoalan yang sebelumnya belum sepenuhnya terselesaikan (MM, Wawancara 2026).

Salah satu temuan paling fundamental adalah bahwa konflik PLTS terapung terjadi di atas tanah sengketa yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Danau Singkarak membawa warisan ketidakadilan dari era PLTA yang tidak pernah dituntaskan secara resmi oleh negara. Ketika proyek baru datang, resistensi bukan sekadar reaksi terhadap proyek baru, melainkan akumulasi dari respons terhadap ketidakadilan historis yang telah lama menumpuk.

Informan AD, perwakilan PT PLN Indonesia Power, mengungkapkan bahwa perusahaan baru mengetahui adanya sengketa tanah antara Nagari Sumpur dan Padang Laweh Malalo pada tahun 2023, tiga tahun setelah proses perencanaan dimulai. Informasi tersebut diperoleh dari surat Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa area switchyard merupakan daerah konflik dan tanahnya tidak dapat disertifikasi. Menurut (AD, Wawancara 2026)., masyarakat seolah-olah menutupi informasi tentang konflik perbatasan tersebut karena menyadari bahwa informasi itu dapat digunakan untuk melemahkan posisi tawar mereka. Dalam perspektif dekonstruksi, ini adalah bentuk subjugated knowledge pengetahuan yang ditekan oleh wacana dominan tetapi tetap hidup dalam praktik sosial masyarakat (Foucault & Gordon, 1980).

Kondisi tersebut penting karena menjelaskan mengapa komunikasi mengenai PLTS tidak diterima hanya berdasarkan informasi mengenai teknologi panel surya. Masyarakat membaca proyek baru melalui pengalaman pembangunan sebelumnya. Sejak PLTA Singkarak beroperasi pada 1992, sebagian besar volume air danau dialihkan melalui terowongan sepanjang 17 km ke Asam Pulau untuk menghasilkan 175 MW listrik, mengakibatkan perubahan debit air, sedimentasi, sampah, dan berkurangnya populasi ikan bilih yang kemudian menjadi bagian dari ingatan sosial masyarakat.

Dalam struktur masyarakat Minangkabau, posisi niniak mamak memiliki otoritas sosial tertentu dalam proses pengambilan dan penyampaian keputusan. Informan MM, seorang tokoh masyarakat di Nagari Guguak Malalo, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan di daerah Minangkabau, niniak mamak harus dilibatkan dalam proses perencanaan terlebih dahulu, baru kemudian niniak mamak menjelaskan kepada

kemenakannya. Menurut MM, permasalahan di Sumatera Barat selalu berkaitan dengan masalah wilayah, sedangkan program pemerintah tidak pernah melibatkan niniak mamak sejak awal. Karena itu, komunikasi kolektif yang mengumpulkan banyak aktor belum tentu menghasilkan legitimasi sosial (MM, Wawancara 2026).

Hal ini terlihat dalam pernyataan yang dibawakan pemerintah daerah. Informan MW, aparatur pemerintah kabupaten, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menerima proyek strategis nasional tersebut terlebih dahulu, dan masalah PLTA serta perhatian yang kurang akan dimasukkan kemudian. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa status PSN bukan sekadar label administratif (MW, Wawancara 2026). Ia memiliki konsekuensi komunikasi karena memengaruhi bagaimana aktor pemerintah daerah mendefinisikan ruang kewenangannya. Pemerintah daerah berada dalam posisi harus merespons masyarakat, tetapi pada saat yang sama merasa berkewajiban mengikuti agenda pemerintah pusat.

Dibaca secara dekonstruktif, temuan ini memperlihatkan bahwa "proyek baru" sebenarnya tidak pernah benar-benar baru. Sebagaimana dijelaskan (Barker & Galasinki, 2001) dalam dekonstruksi memungkinkan peneliti membaca bagaimana wacana pembangunan memusatkan suara negara sebagai kebenaran dominan, sekaligus meminggirkan pengalaman masyarakat lokal. Maknanya dibentuk oleh jejak (trace) proyek sebelumnya pembangunan PLTS memperoleh makna melalui sesuatu yang berada di luar dirinya, yaitu pengalaman historis masyarakat terhadap pembangunan energi terdahulu. Inilah salah satu lapisan kepentingan yang menjadikan konflik Singkarak tidak dapat dibaca secara linear kepentingan masyarakat tidak dapat direduksi menjadi kepentingan ekonomi nelayan semata, melainkan berkelindan dengan keberlanjutan ekologis, identitas lokal, pengalaman historis, dan legitimasi adat.

Dilihat dari perspektif Public Relations, temuan ini menunjukkan bahwa publik bukanlah kelompok homogen yang dapat didefinisikan hanya berdasarkan kategori "penerima pembangunan" bandingkan dengan (Melkote & Steeves, 2015), yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan sebagai basis komunikasi pembangunan. Publik memiliki sejarah hubungan dengan institusi dan membawa kepentingan yang dibentuk oleh pengalaman itu sendiri dukungan penolakan yang meluas dari 13 nagari lain membuktikan bahwa kesadaran kolektif ini tidak terbatas pada batas administratif kecamatan.

B. Panggung Depan dan Panggung Belakang yang Berkontradiksi Proyek PLTS

Analisis dramaturgi Goffman mengungkap bahwa praktik Public Relations pemerintah dalam konflik PLTS Singkarak dapat dibaca sebagai pertunjukan yang gagal. Front stage adalah ruang di mana narasi resmi tentang partisipasi publik, transparansi, dan manfaat pembangunan ditampilkan. Back stage adalah ruang di mana realitas yang kontradiktif sosialisasi prosedural, ambiguitas kelembagaan, pengabaian struktur adat, dan paradoks CSR terjadi.

Data menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan seluruh elemen pertunjukan tempat, pejabat, agenda, bahkan koordinasi keamanan namun gagal mengendalikan definisi situasi karena definisi situasi masyarakat sama sekali berbeda: bukan forum informasi, melainkan momentum penegasan penolakan. Informan CM, aparatur pemerintah kecamatan, mendeskripsikan kegagalan total forum sosialisasi. Menurutnya, perjanjian dengan bupati di Indo Jolito tidak ada poster naik, tetapi pada hari H ternyata sebaliknya, masyarakat menolak. Acara hampir dibatalkan, dan ia melaporkan kepada bupati bahwa keadaan suasana aman, hanya saja poster penolakan sudah naik. Forum yang hampir tidak jadi acara ini adalah kegagalan pertunjukan yang paling dramatik (CM, Wawancara 2026).

Namun yang lebih menarik secara analitis adalah laporan camat kepada bupati bahwa "keadaan suasana aman cuman ya posternya naik." Ini adalah komunikasi yang sangat terstruktur antara dua lapis birokrasi di mana informasi negatif dikurangi dan diperhalus sebelum dikirimkan ke atas. Dalam kerangka komunikasi kritis, ini adalah mekanisme penyaringan informasi (information filtering) yang menciptakan ilusi konsensus di tingkat atas sementara konflik terus membara di bawah.

Kontradiksi di back stage juga terungkap dari fragmentasi informasi di dalam institusi pelaksana. Dua informan dari internal PLN yang diwawancarai secara terpisah mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang memadai tentang proyek yang secara publik diklaim sebagai program strategis nasional. Salah satu informan menyatakan bahwa program ini milik pemerintah, sehingga otomatis harus dilaporkan terlebih dahulu ke tim PLN, yang berarti proyek belum diputuskan.

Informan lainnya bahkan tidak mendapatkan informasi sama sekali dan menduga proyek ini adalah rencana pemerintah atau gubernur. Dua orang dari

institusi yang sama, sama-sama tidak memiliki informasi yang memadai tentang proyek yang secara publik diklaim sebagai program strategis nasional. Ini bukan sekadar ketidakefisienan birokrasi ini mengungkap bahwa proyek PLTS Singkarak beroperasi dalam zona ambiguitas kelembagaan yang sangat tinggi: lahir dari mandat pemerintah pusat, dilaksanakan oleh BUMN yang tidak sepenuhnya sadar perannya, melibatkan investor swasta yang masuk dari jalur tersendiri, dan bermuara pada masyarakat yang tidak pernah benar-benar diajak bicara dari awal.

Dekonstruksi terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa "proyek baru" sebenarnya tidak pernah benar-benar baru. Maknanya dibentuk oleh jejak proyek sebelumnya. Dengan kata lain, pembangunan PLTS memperoleh makna melalui sesuatu yang berada di luar dirinya, yaitu pengalaman historis masyarakat terhadap pembangunan energi sebelumnya. Inilah salah satu lapisan kepentingan yang menjadikan konflik Singkarak tidak dapat dibaca secara linear salah satu-nya informasi yang disampaikan MW Hal ini terlihat dalam pernyataan yang dibawakan pemerintah daerah Bahwasanya ini PSN terima lah proyek strategis nasional ini dulu *beko* masalah PLTA dan perhatian yang kurang. Kita masukan *beko* (MW, wawancara, 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa status PSN bukan sekadar label administratif. Ia memiliki konsekuensi komunikasi karena memengaruhi bagaimana aktor pemerintah daerah mendefinisikan ruang kewenangannya. Pemerintah daerah berada dalam posisi harus merespons masyarakat, tetapi pada saat yang sama merasa berkewajiban mengikuti agenda pemerintah pusat. Dalam proses tersebut, komunikasi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas menyampaikan fakta secara objektif, tetapi sebagai mekanisme produksi makna yang memungkinkan seseorang memengaruhi cara orang lain memahami suatu peristiwa (Goffman, 1956).

Dalam kerangka dramaturgi, status PSN menjadi bagian dari perangkat front stage yang membantu mendefinisikan proyek sebagai sesuatu yang memiliki legitimasi lebih tinggi. Namun, dari perspektif Critical Public Relations, legitimasi administratif tidak identik dengan legitimasi sosial. Keduanya dapat berjalan berbeda. Dekonstruksi memperlihatkan oposisi antara "kepentingan nasional" dan "kepentingan lokal" tidak bersifat stabil. Kepentingan nasional pada dasarnya membutuhkan ruang lokal untuk diwujudkan. Sebaliknya, kepentingan lokal tidak otomatis berarti kepentingan sempit. Ketika masyarakat mempertahankan keberlanjutan Danau Singkarak,

mereka juga sedang mempertahankan sumber daya yang memiliki nilai lebih luas.

Dalam kerangka Public Relations, ini adalah kegagalan two-way symmetrical communication model komunikasi yang ideal di mana organisasi dan publik saling mendengarkan, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Larissa A. Grunig et al., 2002) Praktik sosialisasi PLTS Singkarak lebih mencerminkan model one-way asymmetrical communication komunikasi satu arah yang bertujuan untuk membujuk publik menerima pesan organisasi tanpa memberikan ruang bagi publik untuk mempengaruhi organisasi. Informan HY, masyarakat lokal yang memiliki sudut pandang moderat, mengungkapkan kelelahan yang dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, masalahnya bukan keberadaan kepentingan nasional atau kepentingan korporasi, melainkan bagaimana kepentingan tersebut memperoleh posisi dominan dalam komunikasi pembangunan dan bagaimana kepentingan lain dinegosiasikan.

C. Ketika Hegemoni Datang dari Banyak Arah

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa konflik komunikasi pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak merupakan produk dari kepentingan yang berlapis, bukan sekadar benturan kepentingan antara negara dan masyarakat. Berbagai aktor negara, korporasi, elite lokal, dan politisi sama-sama mengklaim mewakili "suara rakyat" sambil memperjuangkan agenda masing-masing. Inilah yang kemudian peneliti sebut sebagai hegemoni kepentingan berlapis (layered interests).

Negara membawa kepentingan transisi energi dan pembangunan nasional. Korporasi membawa kepentingan pelaksanaan proyek dan investasi. Dalam kerangka dramaturgi, proyek PLTS memiliki front stage berupa narasi pembangunan energi terbarukan, keberlanjutan, dan kepentingan nasional. Namun, di balik panggung tersebut terdapat back stage berupa ketidakpercayaan, pengalaman historis, perbedaan kepentingan, dan persoalan yang belum terselesaikan.

Dekonstruksi terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa "proyek baru" sebenarnya tidak pernah benar-benar baru. Maknanya dibentuk oleh jejak proyek sebelumnya. Dengan kata lain, pembangunan PLTS memperoleh makna melalui sesuatu yang berada di luar dirinya, yaitu pengalaman historis masyarakat terhadap pembangunan energi sebelumnya.

1. Pemerintah daerah: ambiguitas dan kepentingan institusional

Lapisan kepentingan berikutnya terlihat pada posisi pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak sepenuhnya berada di sisi negara pusat dan tidak pula sepenuhnya berada di sisi masyarakat. Mereka berada dalam posisi perantara yang harus mengelola dua tekanan sekaligus. Dokumentasi penelitian menunjukkan adanya rapat antara pemerintah daerah, Indonesia Power, dan PT ACWA Power yang dilakukan dalam konteks meningkatnya resistensi masyarakat.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan institusional berupa kepatuhan administratif, stabilitas pemerintahan, dan pelaksanaan kebijakan nasional. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memiliki kepentingan sosial-politik untuk menjaga hubungan dengan masyarakat yang berada dalam wilayah kewenangannya. Dalam perspektif komunikasi konflik, posisi ini menghasilkan ambiguitas. Pemerintah daerah harus berbicara sebagai representasi negara, tetapi sekaligus menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan konsekuensi konflik lokal. Ambiguitas tersebut membuat komunikasi pemerintah daerah tidak selalu konsisten. (Cornelissen, 2020)

2. Elite lokal dan aktor politik: hegemoni dari bawah dan samping

konflik semakin kompleks adalah adanya aktor-aktor yang memanfaatkan situasi konflik bukan untuk menyelesaikannya, melainkan untuk memperkuat posisi dan pengaruh mereka sendiri. Informan AB, perwakilan legislatif daerah, mengungkapkan bahwa kasus ini sudah sulit untuk diluruskan karena lokasi berada di tanah konflik daerah dan ada aturan yang memungkinkan keuntungan di kemudian hari. Namun, masyarakat lokal memiliki kajian sendiri, dan masalah utamanya menurut AB adalah kasus ini sudah "masuk angin" sudah terlalu banyak pihak yang ikut campur dan menanam kepentingan di dalamnya (AB, Wawancara 2026).

Penggunaan istilah "masuk angin" oleh seorang politisi untuk menggambarkan konflik ini sangat mengungkap secara analitis. Istilah tersebut menyiratkan bahwa konflik telah menjadi terlalu rumit dan dipenuhi oleh berbagai kepentingan yang saling bertabrakan, sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar yang bersih. Ini adalah pengakuan implisit bahwa konflik telah melampaui substansi awalnya dan menjadi arena bagi berbagai kepentingan yang tidak selalu terkait dengan proyek itu sendiri.

Data penelitian juga mengungkap adanya aktor-aktor yang memiliki akses ke jaringan kekuasaan yang jauh melampaui batas nagari dan bahkan provinsi. Informan MM mengungkapkan bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bukhari, yang juga dikaitkan dengan jaringan politik nasional, menyampaikan hal yang sama dalam poin penolakan. Menurut MM, jika hal itu dibawa ke Gubernur atau Bupati, mereka cenderung menyetujui saja karena membahas PSN sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengikuti undang-undang (MM, Wawancara 2026). Pernyataan ini mengungkap bahwa ketika seorang tokoh yang terhubung dengan jaringan politik nasional hadir dan para pejabat dari gubernur hingga bupati 'oke', maka yang beroperasi bukan sekadar dinamika komunikasi antara rakyat dan negara, melainkan jaringan kepentingan politik dan ekonomi yang melampaui level konflik yang tampak di permukaan. Ini adalah bentuk hegemoni yang tidak lagi datang dari negara, melainkan dari elite lokal yang mengklaim sebagai "pembela rakyat" namun sebenarnya memperjuangkan kepentingan pribadi.

3. Masyarakat: Fragmentasi dan Resistensi sebagai Komunikasi Kritis

Di sisi lain, pihak masyarakat pun tidak homogen. Data lapangan mengindikasikan adanya fragmentasi internal. Narasi "masyarakat bersatu menolak PLTS" yang tampak solid di permukaan ternyata menyembunyikan konflik horizontal antar nagari, seperti antara Padang Laweh Malalo dan Sumpur, yang justru memperumit dinamika konflik. Sebagaimana dijelaskan (Barker dan Galasinki, 2001), dekonstruksi memungkinkan peneliti membaca bagaimana wacana pembangunan memusatkan suara negara sebagai kebenaran dominan, sekaligus meminggirkan pengalaman masyarakat lokal. Dalam kasus ini, narasi "masyarakat menolak" digunakan untuk menyederhanakan konflik, padahal realitasnya jauh lebih kompleks.

Namun, resistensi masyarakat juga harus dibaca sebagai praktik komunikasi yang mengandung pengetahuan dan artikulasi kepentingan. Masyarakat memiliki pengetahuan ekologis lokal yang mendalam. Informan MM, yang telah puluhan tahun hidup sebagai nelayan dan pengamat ekologi danau, menjelaskan bahwa PLTS tidak cocok dibangun di Danau Singkarak karena danau ini memiliki karakter badai periodik. Menurut pengalamannya, badai besar terjadi setiap delapan tahun dan dapat mengangkat air hingga tiga meter lebih. Ia pernah membuat landasan terapung untuk paralayang, dan ketika terkena badai, landasan itu hancur (MM, Wawancara 2026).

Pengetahuan tentang badai periodik ini adalah pengetahuan yang sangat krusial bagi desain teknis PLTS terapung. Jika panel surya terapung tidak dirancang untuk menahan gelombang setinggi tiga meter yang terjadi dalam badai periodik tersebut, maka investasi miliaran rupiah dapat hancur dalam semalam. Sayangnya, pengetahuan ini tidak pernah dipertimbangkan dalam kajian teknis yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal yang seharusnya menjadi masukan berharga bagi perencanaan teknis justru diabaikan karena tidak berasal dari sumber yang dianggap "ilmiah". Dalam perspektif dekonstruksi, ini adalah bentuk logosentrisme kecenderungan untuk menganggap bahwa makna (dalam hal ini, kebenaran ilmiah) memiliki pusat yang pasti dan objektif, sehingga mengabaikan pengetahuan lain yang dianggap tidak sah.



Gambar 1: Rapat stakeholder antara pemerintah daerah, Indonesia Power, dan ACWA Power untuk mencapai kesepakatan dalam konflik PLTS Singkarak.
Sumber: Dokumentasi informan MW, 2026

Gambar di atas memperlihatkan forum diskusi pemerintah daerah dengan pihak Indonesia Power dan PT ACWA Power untuk mencapai kesepakatan yang bulat. Rapat ini juga diagendakan karena semakin besarnya gejolak resistensi masyarakat lokal. Kewajiban pemerintah daerah adalah mengikuti instruksi pemerintah pusat. PSN telah ditetapkan dari awal maka tidak ada wewenang pemerintah daerah untuk menolak karena mendorong kepentingan negara (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan).

D. Dekonstruksi Wacana: Oposisi Biner dan Makna yang Disenyapkan

Dekonstruksi terhadap wacana pembangunan PLTS Singkarak menunjukkan bahwa oposisi-oposisi biner yang ada seperti "pembangunan vs penolakan", "kepentingan nasional vs kepentingan lokal", "modern vs

tradisional" tidak bersifat netral. Oposisi tersebut membentuk hierarki makna yang menempatkan satu posisi sebagai lebih rasional atau lebih legitimate dibandingkan posisi lainnya.

Oposisi paling dominan adalah pembangunan versus penolakan. Dari sisi pemerintah dan perusahaan, oposisi ini digunakan untuk menempatkan penolak sebagai kelompok yang anti kemajuan. Namun, data menunjukkan bahwa masyarakat sesungguhnya tidak memiliki penolakan yang bersifat ideologis terhadap energi terbarukan. Informan MM menegaskan bahwa masyarakat sebenarnya setuju dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memanfaatkan panel surya, tetapi yang menjadi persoalan adalah dampaknya (MM, Wawancara 2026). Ini adalah celah yang sangat penting namun belum pernah dieksploitasi secara konstruktif: ada basis kesepakatan prinsipil yang dapat menjadi fondasi negosiasi, namun basis ini tidak pernah dibangun menjadi platform dialog karena kedua sisi terlanjur terkunci dalam oposisi biner yang kaku. Dekonstruksi atas oposisi ini tidak berarti membuang keberatan masyarakat; ia berarti membedakan antara penolakan terhadap proyek seperti yang direncanakan saat ini dan penolakan terhadap prinsip energi terbarukan itu sendiri.

Oposisi kedua yang perlu didekonstruksi adalah antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal. Narasi pemerintah menempatkan PSN sebagai representasi kepentingan nasional yang harus didahulukan. Namun pembacaan ini mengabaikan fakta bahwa ekosistem Danau Singkarak adalah bagian dari warisan ekologis nasional yang sama, bahwa keberlanjutan ikan Bilih adalah bagian dari kedaulatan pangan nasional yang sama, dan bahwa kesejahteraan komunitas nelayan Singkarak adalah bagian dari kesejahteraan nasional yang sama. Dekonstruksi memperlihatkan bahwa oposisi antara "kepentingan nasional" dan "kepentingan lokal" tidak bersifat stabil. Kepentingan nasional pada dasarnya membutuhkan ruang lokal untuk diwujudkan. Sebaliknya, kepentingan lokal tidak otomatis berarti kepentingan sempit.

E. Menuju komunikasi pembangunan yang refleksif

Keseluruhan analisis mengarah pada sebuah argumen sentral: konflik pembangunan PLTS terapung di Danau Singkarak bukan hanya konflik antara negara dan masyarakat, melainkan konflik yang diperparah oleh kepentingan berlapis di mana hampir setiap aktor dari pemerintah pusat hingga elite lokal, dari investor hingga politisi yang mengatasnamakan rakyat membawa

kepentingannya sendiri ke dalam arena yang sesungguhnya membutuhkan dialog yang jujur dan tidak berpretensi.

Narasi yang selama ini dominan, baik narasi pemerintah tentang kepentingan nasional maupun narasi resistensi tentang keberpihakan kepada rakyat, keduanya mengandung kebenaran parsial namun juga menutup kebenaran yang lain. Yang dibutuhkan bukan narasi yang semakin keras, melainkan narasi yang semakin jujur tentang kompleksitas kepentingan yang ada dan tentang kondisi-kondisi konkret yang harus dipenuhi agar semua pihak dapat bertindak dengan integritas.

Proposisi teoritis utama yang dihasilkan penelitian ini adalah bahwa dalam konflik pembangunan yang melibatkan komunitas dengan sistem adat yang kuat dan warisan ketidakadilan yang belum terselesaikan, komunikasi yang efektif tidak dapat dimulai dari sosialisasi proyek. Ia harus dimulai dari rekonstruksi kepercayaan yang dibangun melalui pengakuan jujur atas kesalahan masa lalu, penyelesaian agenda yang tertunda, dan pelibatan otoritas yang diakui masyarakat gateway adat sebagai mitra perencana, bukan sebagai audiens sosialisasi.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, struktur adat memengaruhi legitimasi komunikasi sehingga partisipasi tidak dapat dipahami hanya sebagai kehadiran dalam forum kolektif. Partisipasi sosial-budaya menuntut pengakuan terhadap otoritas dan struktur komunikasi yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, komunikasi pembangunan yang efektif harus menghormati hierarki adat dan menempatkan setiap orang sesuai dengan konteksnya, sebagaimana disampaikan informan FR bahwa di masyarakat ada beberapa orang yang memang ditempatkan sebagai tempat bertanya, tempat orang yang ditinggikan selangkah. Pola komunikasi yang paling bagus adalah menempatkan setiap orang sesuai dengan konteksnya (FR, Wawancara 2026).

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik komunikasi pembangunan PLTS Terapung Danau Singkarak tidak dapat dipahami sebagai benturan sederhana antara negara dan masyarakat. Konflik ini dibentuk oleh kepentingan berlapis dari negara, korporasi, pemerintah daerah, elite lokal dan aktor politik, tokoh adat, serta masyarakat. Hampir semua aktor tersebut mengklaim mewakili "suara rakyat" sambil membawa agendanya masing-masing.

Pertama, resistensi masyarakat bukan penolakan terhadap energi terbarukan atau modernisasi. Resistensi itu berakar pada pengalaman historis pembangunan PLTA Singkarak yang dampaknya belum diselesaikan, kekhawatiran terhadap kelestarian ikan bilih dan ekosistem danau, serta persoalan sengketa batas wilayah yang belum tuntas. Karena itu, proyek PLTS dibaca masyarakat melalui "jejak" proyek sebelumnya, sehingga tidak pernah benar-benar dipandang sebagai proyek baru.

Kedua, praktik Public Relations pemerintah lebih mendekati model komunikasi satu arah asimetris ketimbang komunikasi dua arah simetris. Dalam kerangka dramaturgi Goffman, narasi partisipasi, transparansi, dan manfaat pembangunan di panggung depan bertolak belakang dengan kondisi panggung belakang. Kondisi itu berupa sosialisasi yang prosedural, informasi yang disaring antarlapisan birokrasi, ambiguitas kelembagaan di antara pelaksana proyek, dan tidak dilibatkannya niniak mamak sejak awal. Akibatnya, legitimasi administratif berupa status PSN tidak otomatis menghasilkan legitimasi sosial.

Ketiga, pembacaan dekonstruktif memperlihatkan bahwa oposisi biner seperti pembangunan versus penolakan, kepentingan nasional versus lokal, dan modern versus tradisional bersifat tidak stabil dan menyembunyikan hierarki makna. Masyarakat sendiri tidak homogen. Terdapat fragmentasi antarnagari dan pengetahuan ekologis lokal, misalnya tentang badai periodik danau, yang terabaikan oleh logika teknis-ilmiah yang dominan.

Keempat, penelitian ini mengajukan konsep kepentingan berlapis (layered interests) yang memperluas kajian Critical Public Relations. Kajian tersebut tidak lagi berhenti pada oposisi negara versus masyarakat, tetapi juga melihat hegemoni yang datang dari atas, dari samping, dan dari bawah. Secara praktis, komunikasi pembangunan pada komunitas dengan struktur adat kuat dan warisan ketidakadilan yang belum selesai sebaiknya tidak dimulai dari sosialisasi proyek. Komunikasi itu perlu dimulai dari pemulihan kepercayaan. Langkahnya adalah mengakui kesalahan masa lalu secara jujur, menyelesaikan agenda yang tertunda, dan melibatkan niniak mamak sebagai mitra perencana, bukan sekadar audiens. Penelitian ini dibatasi pada satu kasus lokal dengan 13 informan dan tidak menilai kelayakan teknis PLTS. Penelitian lanjutan dapat membandingkannya dengan konflik energi terbarukan di wilayah adat lain atau menguji konsep kepentingan berlapis secara lebih luas.

Kontribusi Penulis

Rahman Karim: Berkontribusi dalam perumusan konsep penelitian, penyusunan metodologi, pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan draf awal naskah. Emeraldy Chatra: Berkontribusi dalam pembimbingan akademik, pengembangan kerangka konseptual, serta peninjauan dan penyempurnaan substansi naskah. Sarmiati: Berkontribusi dalam pembimbingan akademik, penguatan landasan teoretis, serta peninjauan dan penyuntingan naskah. Seluruh penulis telah membaca, meninjau, dan menyetujui naskah akhir untuk dipublikasikan.

Referensi

Ar-Ridho, A., & Ishartono. (2019). Konflik kepentingan lahan warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung dalam kasus realisasi program rumah deret. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(2). https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i2.23243

Barker, C., & Galasinski, D. (2001). *Cultural studies and discourse analysis: A dialogue on language and identity*. SAGE Publications.

Cieri, E., & Magalhaes, A. L. (2012). *Communication management in organizations. In Proceedings of the 77th Annual Convention of the Association for Business Communication*. Association for Business Communication. https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/TABC/2a6341d8-64a1-4735-9839-09a0094bc417/UploadedImages/ABC_Annual_International_Conference_Proceedings/2012_Annual_Conference/2012-abc-cieri.pdf

Cornelissen, J. (2020). *Corporate communication: A guide to theory and practice* (6th ed.). SAGE Publications.

Derrida, J. (1997). *Of grammatology* (G. C. Spivak, Trans.; Corrected ed.). Johns Hopkins University Press.

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings*, 1972–1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books..

Goffman, E. (1956). *The presentation of self in everyday life.* University of Edinburgh, Social Sciences Research Centre.

Grunig, L. A., Grunig, J. E., & Dozier, D. M. (2002). *Excellent public relations and effective organizations: A study of communication management in three countries*. Lawrence Erlbaum Associates.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV Pustaka Ilmu Group.

Holtz, Shel. (2002). *Public relations on the Net: winning strategies to inform and influence the media, the investment community, the government, the public, and more!* AMACOM.

Holtzhausen, D. R. (2012). *Public relations as activism: Postmodern approaches to theory & practice*. Routledge.

Larissa A. Grunig, James E. Grunig, & David M. Dozier. (2002). *EXCELLENT PUBLIC RELATIONS AND EFFECTIVE ORGANIZATIONS A Study of Communication Management in Three Countries*. www.erlbaum.com.

Mariana, D. (2015). Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 216. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834

Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2015). *Communication for development: Theory and practice for empowerment and social justice* (3rd ed.). SAGE Publications.

Radtke, J., & Löw-Beer, D. (2025). Unpacking local energy conflicts: Drivers, narratives, and dynamics of right-wing populism and local resistance to energy transitions in Germany. *Energy Strategy Reviews*, *61*. https://doi.org/10.1016/j.esr.2025.101844

Rasyidin, A., Gusmini, G., Saidi, A., Putra, E. E., Hermansyah, H., Firmansyah, F., Yenni, M., Elihasridas, E., Masrizal, M., Refdinal, R., Sidin, F. H. M. N., & Wahyuni, S. (2009). *The society empowerment of Tanah Datar District at Singkarak lacustrine areas using the integrated farming system, agroforestry and agroecotoursm*. Lembaga Pengabdian Masyarakat, Universitas Andalas.

Sastra Hadi, E., & Vidya Putra, E. (2019). Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Di Gunung Talang Kabupaten Solok. *Jurnal Perspektif*, *2*(3), 236. https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.95

Strömbäck, J., & Kiousis, S. (Eds.). (2011). *Political public relations: Principles and applications*. Routledge

Umam, M. F. Z., Mulyadi, A., & Nofrizal, N. (2024). Strategi Konservasi Daerah Tangkapan Air Danau Singkarak. *Jurnal Zona*, *8*(1), 8–15. https://doi.org/10.52364/zona.v8i1.103

Putra, T. H., & Supanggah, R. (2018). MEMUDARNYA WIBAWA NINIAK MAMAK SEBAGAI URANG NAN GADANG BASA BATUAH DI

MINANGKABAU. Gelar : Jurnal Seni Budaya, 15(2). https://doi.org/10.33153/glr.v15i2.2218

Sedu, V. A., Bhoko, F. K., & Retu, M. K. (2026). Strategi komunikasi Public Relations dalam penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 6(1), 85–90. https://doi.org/10.57250/ajsh.v6i1.2252

AB. (2026). Wawancara pribadi mengenai pandangan legislatif terhadap konflik PLTS Danau Singkarak [Transkrip Wawancara]. Tanah Datar.

AD. (2026). Wawancara pribadi mengenai latar belakang proyek dan strategi komunikasi PT PLN Indonesia Power/ACWA Power [Transkrip Wawancara]. Tanah Datar

CM. (2026). Wawancara pribadi mengenai dinamika sosialisasi dan peran pemerintah kecamatan dalam konflik PLTS Danau Singkarak [Transkrip Wawancara]. Batipuh Selatan.

FR. (2026). Wawancara pribadi mengenai kajian sosial-ekologis dan hambatan komunikasi dalam konflik PLTS Danau Singkarak [Transkrip Wawancara]. Padang.

HY. (2026). Wawancara pribadi mengenai perspektif masyarakat lokal terhadap sosialisasi dan negosiasi proyek PLTS Danau Singkarak [Transkrip Wawancara]. Batipuh Selatan.

MM. (2026). Wawancara pribadi mengenai dampak ekologis, sosial, dan ekonomi PLTS terhadap masyarakat Danau Singkarak [Transkrip Wawancara]. Guguak Malalo.

MW. (2026). Wawancara pribadi mengenai proses perizinan, koordinasi kelembagaan, dan respons pemerintah daerah terhadap konflik PLTS Danau Singkarak [Transkrip Wawancara]. Tanah Datar.